

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Arifin Hoesein, Zainal. (2009). *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bruggink, J.J.H. (1996). *Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Alih bahasa Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bruggink, J.J.H. (1999). *Refleksi Tentang Hukum*. Alih bahasa Arief Sidharta. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Dicey, A.V. (1885). *Introduction to the Study of the Law of Constitution*.
- Hartono, Sunaryati. (2005). *Dalam Lokakarya RUU Tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Makassar.
- Hadjon, Philipus M. (2004). *Implikasi UU No. 9 Tahun 2004 Terhadap Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Manan, Bagir. (1994). *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan Jangka Panjang II*. Bandung: Unpad.
- Manan, Bagir. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Unisba.
- Marsuni, Lauddin. (2016). *Hukum Perundang-Undangan di Indonesia: Teori dan Praktek*. Makassar: Litera Institute.
- Marbun, S.F. dkk. (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Peter, A.A.A. & Siswosebroto, Koesriani. (1988). *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Dalam Adam Podgorecki & Christoper J. Whelan (Eds.). Jakarta: Sinar Harapan.

- Ridwan, H.R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soehino, H. (1993). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Suprpto, Maria Farida Indrati. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar Pemikirannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suprpto, Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suprpto, Maria Farida Indrati. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Ed. Revisi). Yogyakarta: Kanisius.
- Usman, Sabian. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

JURNAL :

- Budoyo, Sapto. (2014). Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 2, Juli, hlm. 615.
- Luthan, Salman. Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis. *Jurnal Hukum*, Vol. IV, No. 7, hlm. 57.
- Muhtada, Dani & Diniyanto, Ayon. (2017). Harmonisasi Perda: Tantangan dan Strategi di Era Otonomi Daerah. *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 – Penataan Regulasi di Indonesia*.
- Suhartono. (2011). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Triputra, Y.A. (2016). Harmonisasi Perda terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Lex Librum*, 3(1), 419.

Wacika, K.T. & Resen, M.G.S.K. (2021). Harmonisasi Ranperda yang Diajukan Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(9), hlm. 1579.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perda.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya.

Permenkumham Nomor 20 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.